

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI  
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Master Administrasi Publik Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Acl yrgrn tsn5  
10/8/2023  
Rp msh  
ya. dr. Eka Pratama

**OLEH:**

**ANGGY REONAL**

**NIM : 2220842004**

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2024**

## **ABSTRAK**

**Anggy Reonal, NIM 2220842004, Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dibimbing Oleh Dr. Roni Ekha Putera,S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, M.Soc, Sc. Tesis ini terdiri dari 141 halaman dengan referensi 8 buku teori, 4 buku metode, 7 jurnal, 8 dokumen, dan 2 website.**

Penyelenggaraan organisasi pemerintahan memerlukan birokrasi yang ramping dan fleksibel agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan cepat kepada masyarakat. Langkah tersebut tertuang dalam bentuk kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyederhanaan birokrasi terlaksana di pemerintah Kota Padang Panjang, menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif, serta analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, hasil penelitian menunjukkan implementasi penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang telah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari faktor komunikasi yang sudah jelas, sumber daya yang memadai, disposisi yang terlaksana dan struktur birokrasi tersedia dengan baik, keberhasilan implementasi kebijakan dapat terlihat dari penyederhanaan struktur organisasi yang dapat dilaksanakan diseluruh perangkat daerah, keseimbangan jabatan telah tercapai melalui penataan organisasi sesuai tugas dan fungsi, kendati demikian penelitian ini belum bisa menjelaskan unsur dampak serta fenomena lain diluar organisasi pemerintahan, diataranya unsur kepentingan dari pengambil kebijakan, serta dampak dari kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kinerja dan motifasi kerja pegawai negeri sipil pasca penyederhanaan birokrasi di Kota Padang Panjang

Kata kunci : implementasi kebijakan, penyederhanaan birokrasi, penetapan jabatan administrasi ke jabatan fungsional

## ABSTRACT

**Anggy Reonal, NIM 2220842004, Implementation of Biocracy Simplification Policy in the Regional Government of Padang Panjang City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Supervised by Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA and Dr. Hendri Koeswara, M. Soc, Sc. This thesis consists of 141 pages with references from 8 theory books, 4 method books, 7 journals, 8 documents, and 2 websites.**

The administration of government organizations requires a lean and flexible bureaucracy in order to provide quality and fast public services to the community. This step is contained in the form of a bureaucratic simplification policy in the central government and regional governments. This research aims to analyze how the implementation of bureaucratic simplification is carried out in the Padang Panjang City government, using Edward III's policy implementation theory with communication, resources, disposition and organizational structure variables. Method used in this research is descriptive, as well as data analysis using Miles and Huberman data analysis techniques, the results of the research show that the implementation of bureaucratic simplification in the Padang Panjang City government has been carried out well as can be seen from the factors of clear communication, adequate resources, good disposition implemented and the bureaucratic structure is in place well, the success of policy implementation can be seen from the simplification of the organizational structure which can be implemented in all regional apparatus, balance of positions has been achieved through structuring the organization according to tasks and functions, however this research cannot explain the impact elements and other phenomena outside the organization government, including elements of the interests of policy makers, as well as the impact of bureaucratic simplification policies on the performance and work motivation of civil servants after bureaucratic simplification in Padang Panjang City

Key words: policy implementation, bureaucratic simplification, equalization of administrative positions to functional positions